



DAFTAR JUMLAH PIRANTI LUNAK KABARESKRIM
SAT RESNARKOBA POLRES LOMBOK TENGAH

NO.	JENIS	NOMOR TAHUN	TENTANG	JUMLAH	KET
1	2	3	3	3	3
1.	UNDANG UNDANG	NO. 8 TAHUN 1976	TENTANG PENGESAHANAN KONVENSI TUNGGAL NARKOTIKA 1961 BESERTA PROTOKOL YANG MENGUBAHNYA		
2.	UNDANG UN DANG	NO. 9 TAHUN 1976	TENTANG NARKOTIKA		
3.	UNDANG UNDANG	NO. 23 TAHUN 1992	TENTANG KESEHATAN		
4.	UNDANG UNDANG	UU NO. 8 TAHUN 1996	TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1971		
5.	UNDANG UNDANG	NO. 7 TAHUN 1997	TENTANG PENGESAHAN UN CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUG AND PSYCHOTROPIC		
6.	UNDANG UNDANG	NO. 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA	TENTANG PSIKOTROPIKA		
7.	UNDANG UNDANG	NO 22 TAHUN 1997	TENTANG NARKOTIKA		
8.	KUHP		TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA		
9.	KUHAP		TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA		



DAFTAR JUMLAH PIRANTI LUNAK KAPOLRI
SAT RESNARKOBA POLRES LOMBOK TENGAH

NO.	JENIS	NOMOR TAHUN	TENTANG	JUMLAH	KET
1	2	3	3	3	3
1.	PERATURAN KAPOLRI	TAHUN 2008-2010	TENTANG HIMPUNAN PERATURAN KAPOLRI BIDANG OPERASIONAL TAHUN 2008-2010		
2.	UU RI	NO. 35 TAHUN 2009	TENTANG UNDANG UNDANG NARKOTIKA		
3.	UU RI	NO. 36 TAHUN 2009	TENTANG UNDANG UNDANG KESEHATAN		
4.	UU RI	NO. 5 TAHUN 1997	TENTANG PSIKOTROPIKA		
5.	KUHP	TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA	TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA		
6.	PERATURAN KAPOLRI	NO. 2 TAHUN 2008	TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN BAHAN PELEDAK KOMERSIAL		
7.	PERATURAN KAPOLRI	NO. 3 TAHUN 2008	TENTANG PEMBENTUKAN RUANG PELAYANAN KHUSUS DAN TATA CARA PEMERIKSAAN SAKSI DAN ATAU KORBAN TINDAK PIDANA		
8.	PERATURAN KAPOLRI NO. 7 tahun 2008	NO. 7 tahun 2008	TENTANG PEDOMAN DASAR STRATEGI DAN IMPLEMENTASI PEMOLISIAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA		
9.	PERATURAN KAPOLRI NO. 9 tahun 2008	NO. 9 tahun 2008	TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN, PENGAMANAN DAN PENANGANAN PERKARA PENYAMPAIAN		

			PENDAPAT DIMUKA UMUM		
10.	PERATURAN KAPOLRI NO. 1 tahun 2009	NO. 1 tahun 2009	TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN		
11.	PERATURAN KAPOLRI NO. 3 tahun 2009	NO. 3 tahun 2009	TENTANG SISTIM OPERASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA		
12.	PERATURAN KAPOLRI NO. 7 tahun 2009	NO. 7 tahun 2009	TENTANG SISTIM LAPORAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT		
13.	PERATURAN KAPOLRI NO. 8 tahun 2009	NO. 8 tahun 2009	TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA		
14.	PERATURAN KAPOLRI	NO. 10 tahun 2009	TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMINTAAN PEMERIKSAAN TEKNIS KRIMINALISTIK TEMPAT KEJADIAN PERKARA DAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI KEPADA LABORATORIUM FORENSIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA		
15.	PERATURAN KAPOLRI NO. 12 tahun 2009	NO. 12 tahun 2009	TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA		
16.	PERATURAN KAPOLRI NO. 17 tahun 2009	NO. 17 tahun 2009	TENTANG MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA		
17.	PERATURAN KAPOLRI NO. 5 tahun 2010	NO. 5 tahun 2010	TENTANG TATA CARA PENYADAPAN PADA PUSAT PEMANTAUAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA		
18.	PERATURAN KAPOLRI NO. 6 tahun 2010	NO. 6 tahun 2010	TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL		
19.	PERATURAN KAPOLRI NO. 8 tahun 2010	NO. 8 tahun 2010	TENTANG TATA CARA LINTAS GANTI DAN CARA BERTINDAK DALAM		

			PENANGULANGAN HURU HARA		
20.	PERATURAN KAPOLRI NO. 10 tahun 2010	NO. 10 tahun 2010	TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA		
21.	PERATURAN KAPOLRI NO. 11 tahun 2010	NO. 11 tahun 2010	TENTANG PENANGANAN PENJINAKAN BOM		
22.	PERATURAN KAPOLRI NO. 12 tahun 2010	NO. 12 tahun 2010	TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI		
23.	PERATURAN KAPOLRI NO. 14 tahun 2010	NO. 14 tahun 2010	TENTANG PENANGANAN ANCAMAN KIMIA, BIOLOGI DAN RADIOAKTIF		
24.	PERATURAN KAPOLRI NO. 15 tahun 2010	NO. 15 tahun 2010	TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA		
25.	PERATURAN KAPOLRI NO. 16 tahun 2010	NO. 16 tahun 2010	TENTANG TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA		
26.	PERATURAN KAPOLRI NO. 20 tahun 2010	NO. 20 tahun 2010	TENTANG KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENYIDIKAN BAGI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL		

Praya, 31 Desember 2016
KASAT RESNARKOBA POLRES LOTENG


ERY ARMUNANTO, SH
IPTU NRP 72050012

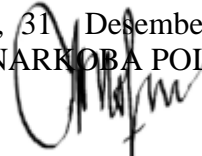


**DAFTAR JUMLAH PIRANTI LUNAK POLDA
SAT RESNARKOBA POLRES LOMBOK TENGAH**

NO.	JENIS	NOMOR TAHUN	TENTANG	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6
1.	PP NO. 1 TAHUN 1980	NO. 1 TAHUN 1980	TENTANG KETENTUAN PENANAMAN PAPAVAR, KOKA DAN GANJA		
2.	KEPPRES NO. 3 TAHUN 1997	NO. 3 TAHUN 1997	TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL		
3.	KEPPRES NO. 116 TAHUN 1999	NO. 116 TAHUN 1999	TENTANG BADAN KOORDINASI NARKOTIKA NASIONAL		
4.	KEPPRES NO. 17 TAHUN 2002	NO. 17 TAHUN 2002	TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL		
5.	INPRES NO. 3 TAHUN 2002	NO. 3 TAHUN 2002	TENTANG PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA,PSIKOTROPIKA,PREKURSOR , DAN SAT ADIKTIF LAINNYA		
6.	PERMENKES NO. 28/MENKES/per/I/1978	NO. 28/MENKES/per/I/1978	TENTANG PENYIMPANAN NARKOTIKA		
7.	PERMENKES NO. 229/MENKES/per/VII/1978	NO. 229/MENKES/per/VII/1978	TENTANG JARUM SUNTIK, SEMPRIK SUNTIK, PIPA PEMADATAN DAN		

			ANHIDRIDA ASAM ASETAT		
8.	PERMENKES NO. 688/MENKES/per/VII/1997	NO. 688/MENKES/per/VII/1997	TENTANG PEREDARAN PSIKOTROPIKA		
9.	PERMENDAG NO. 15/M- DAG/PER/3/2006	NO. 15/M-DAG/PER/3/2006	TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IMPOR, PENGEDARAN DAN PENJUALAN, DAN PERIJINAN MINUMAN BERALKOHOL		

Praya, 31 Desember 2016
KASAT RESNARKOBA POLRES LOTENG


ERY ARMUNANTO, SH
IPTU NRP 72050012

